



**Pemerintah
Kabupaten
Temanggung**

LAPORAN EVALUASI RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 - 2026



PEMERINTAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjukNya semata, maka Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dengan capaian kinerja Tahun 2024 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu strategis dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga dengan tersusunnya Evaluasi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 capaian kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pijakan bagi perbaikan perencanaan di masa yang akan datang, serta sebagai pedoman dalam menyusun rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut kami jajaran Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menyikapi secara profesional dan proporsional terhadap hasil dari Evaluasi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 capaian kinerja Tahun 2024, baik yang memenuhi harapan maupun yang masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan, agar dikemudian dapat menyusun perencanaan yang lebih baik.

Akhirnya kami berharap agar Evaluasi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, 6 Januari 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung
Agus Sujatwo



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
VERIFIKASI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Kerangka Pikir	4
1.5 Teknik Pengolahan Data.....	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM RENCANA STRATEGIS	8
2.1. Capaian pada indikator Tujuan dan Sasaran	8
BAB III EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH	17
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Rekomendasi	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	7
Tabel 2. 1 Evaluasi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	8
Tabel 2. 2 Evaluasi terhadap Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Renstra Sekretariat Daerah	11
Tabel 3. 1 Program, kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah.....	18
Tabel 3. 2 realisasi program dan kegiatan yang telah dicapai	32

VERIFIKASI
EVALUASI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN EVALUASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal :

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Petugas Verifikator,

Ewiek Khavida, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

Arthati Dwi Hutami, S.E.
NIP. 19790611 200312 2 006

Mengetahui
Kepala Bappeda
Kabupaten Temanggung,

Dr. Hendra Sumaryana M.T.
NIP. 19720324 199203 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana-rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan pengendalian dan evaluasi Renstra lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 284, 285 dan 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pasal 284 menyebutkan bahwa :

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin :
 - a. Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan pasal 285 dari Permendagri tersebut menyebutkan bahwa:

1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Dengan melihat berbagai amanat peraturan perundang-undangan di atas, maka penting bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk melakukan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Melalui Dokumen Evaluasi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dapat diketahui hasil

program dan kegiatan yang telah berjalan dan terakomodir serta capaian target dan sasaran di Tahun 2024

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Evaluasi Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024- 2026 adalah untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Sekretariat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Evaluasi Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Temanggung adalah:

1. Menganalisis tingkat pencapaian target kinerja;
2. Menganalisis tentang permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan upaya pemecahan yang telah dilaksanakan; dan
3. Merumuskan rekomendasi sebagai masukan dalam penyusunan Renstra periode berikutnya.

1.4 Kerangka Pikir

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Pendidikan melakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan.

Evaluasi hasil Renstra dilakukan terutama untuk melihat konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah dan DPA APBD tahunan selama kurun waktu Tahun 2024-2026. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan pada tahun tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah. Evaluasi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung diharapkan dapat memetakan perkembangan capaian kinerja hasil Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2024. Evaluasi hasil Renstra ini akan menjadi masukan dalam rangka penyusunan Renja tahun-tahun berikutnya.

Beberapa dokumen yang akan digunakan dalam penyusunan evaluasi Renstra adalah sebagai berikut:

- a. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, sebagai acuan dasar dalam penentuan indikator yang akan diukur dalam evaluasi Renstra.
- b. Dokumen pelaporan seperti LKjIP dan LKPJ Tahun 2024.

Substansi utama yang akan dibahas dalam evaluasi Renstra meliputi tujuan dan sasaran Renstra yang tergambarkan dari berbagai indikator kinerja sasaran yang dapat diukur secara kuantitatif. Substansi evaluasi Renstra dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu:

a. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran.

b. Evaluasi terhadap pencapaian target indikator program

Proses penyusunan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung akan dilakukan melalui tahapan utama berupa Penetapan Indikator Kinerja. Tahap selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data pencapaian target Renstra meliputi Indikator Sasaran; dan Indikator Kinerja Program.

1.5 Teknik Pengolahan Data

Evaluasi capaian Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra. Penghitungan capaian Kinerja memperhatikan karakteristik indikator Renstra, yaitu sebagai berikut.

a. Indikator Positif, yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka capaian kinerja maka kondisinya semakin baik. Persentase capaian target untuk indikator positif dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

b. Indikator Negatif, yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka capaian kinerja maka kondisinya justru semakin jelek. Persentase capaian target untuk indikator negative dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \{1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target})\} \times 100\%$$

Untuk mengukur capaian kinerja, digunakan skala nilai yang terdapat didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA 1 TAHUN (PERMENDAGRI 86/2017)
1	Sangat Tinggi	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	76 % ≤ 90%
3	Sedang	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	≤ 50 %

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

1.6 Sistematika Penulisan

Evaluasi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, kerangka piker, teknis pengelolaan data dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM RENCANA STRATEGIS

Bab ini berisikan evaluasi capaian target indikator tujuan, sasaran dan program Renstra

BAB III EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN RENSTRA

Bab ini berisikan realisasi program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra PD Tahun 2026

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM RENCANA STRATEGIS

2.1. Capaian pada indikator Tujuan dan Sasaran

Secara rinci evaluasi pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1
Evaluasi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Renstra Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2024		Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian Target Akhir Renstra (2026)	Kriteria Penilaian Realisasai Kinerja
			Target	Realisasi			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Pemda)	Angka	66,36	66,36	67,5	100	Sangat Tinggi
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	B/76,61 – 88,30	86,91	B/76,61 – 88,30	100	Sangat Tinggi
3	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,434	3, 434	3,46	100	Sangat Tinggi
4	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Persentase kebijakan bidang bina mental dan spiritual	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
6	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
7	Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	Angka	30	71,76	60	100	Sangat Tinggi
8	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	Predikat	B (3,51-4,00)	A- (4,29)	B (3,51-4,00)	100	Sangat Tinggi
9	Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan di tahun 2024 sebesar 100 %.

Adapun alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Pemda), alternatif untuk capaian nilai ini adalah tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya seperti penyempurnaan Pohon Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Daerah dan sebagian besar Perangkat Daerah serta melaksanakan perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP yang linier.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), solusi untuk mencapai target adalah perbaikan pelayanan dari hasil survei sebelumnya, mempermudah akses pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta melaksanakan bimbingan teknis pelayanan prima bagi petugas layanan.
3. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), solusi untuk pencapaian target adalah menjaga sinergitas yang baik antara Bagian Pemerintahan selaku sekretariat IKK LPPD dengan OPD pengampu dengan melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK), melaksanakan koordinasi dengan Kemendagri serta provinsi terkait dengan penyelarasan rumus Indikator Kinerja Kunci (IKK).
4. Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum, bahwa terkait dengan indikator ini data terdiri dari bantuan hukum yang diberikan secara litigasi maupun non litigasi, fasilitasi pembuatan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, dan layanan informasi hukum (tersedia dalam JDIH Kabupaten Temanggung) yang terlaksana.
5. Persentase kebijakan bidang bina mental dan spiritual alternatif solusi untuk pencapaian target adalah dengan melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi terhadap unsur terkait, penguatan kepatuhan

terhadap regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi SDM.

6. Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi, solusi untuk pencapaian target adalah dengan melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi terhadap unsur terkait, penguatan kepatuhan terhadap regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi SDM.
7. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa solusi untuk pencapaian target adalah adanya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sedangkan faktor penghambat karena persiapan perencanaan dari Perangkat Daerah dan kebijakan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan, adapun upaya pencapaian target kinerja adalah membuat surat Edaran Nomor: 530/137/2024 Tgl. 2 Februari 2024 tentang Optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
8. Nilai penyelenggaraan pelayanan public, solusi pencapaian target dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di unit pelayanan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan pada unit pelayanan yang akan dilakukan penilaian pada tahun berjalan.
9. Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan, factor yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Kunjungan Tamu Kedinasan Pimpinan Daerah yang Terfasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan adalah Adanya tamu kedinasan dan masyarakat yang memanfaatkan layanan Bagian Umum serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sehingga perlu adanya komitmen meningkatkan layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan dengan menyusun SOP dan melaksanakan koordinasi sehingga menciptakan keselarasan.

Tabel 2. 2
Evaluasi terhadap Pencapaian Target Indikator Kinerja
Program Renstra Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian Target Akhir Renstra (2026)	Kriteria Penilaian Realisasai Kinerja
			Target	Realisasi			
I	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						
1	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik	%	85	87,84	86	100	Sangat Tinggi
5	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	60	80	60	100	Sangat Tinggi
6	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	85	100	86	100	Sangat Tinggi
7	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	73,24	100	73,24	Sedang
8	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
9	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi		100	100	100	100	Sangat Tinggi
II	Program Perekonomian dan Pembangunan						
1	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	83,33	100	Sangat Tinggi
4	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	95,54	100	95,54	Sangat Tinggi

	yang Selesai Tepat Waktu						
5	Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	97,09	100	97,09	Sangat Tinggi
6	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	100	97,76	100	97,76	Sangat Tinggi
7	Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%	100	97,70	100	97,70	Sangat Tinggi
8	Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
9	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	97	78,50	99	80,93	Tinggi
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						
1	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB	%	17,39	30,43	100	100	Sangat Tinggi
4	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

- Target Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH belum tercapai karena adanya faktor penghambat yaitu lambatnya penyeteroran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari sarpras yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal.

- Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Selesai Tepat Waktu karena adanya faktor penghambat yaitu target terlalu rendah, Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
- Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu karena adanya faktor penghambat kurang tertibnya admin dalam input data ke laporan setiap bulan, ketidaksesuaian data dan mutasi admin aplikasi.
- Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah karena adanya faktor penghambat adalah proses perencanaan dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga pelaksanaan lelang dan pekerjaan terlambat dan PD terlambat input dan yang diinput bukan data terbaru.
- Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa karena adanya faktor penghambat Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 50 juta.
- Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan (tender) karena adanya faktor penghambat karena Kinerja pengadaan di OPD masih terdapat proses pelaksanaan yang belum menggunakan LPSE salah satunya Belanja s.d 50 Juta; dan Aturan tentang pengadaan barang/jasa yang perubahannya cepat membuat Pelaku pengadaan belum sepemahaman dalam melaksanakan pengadaan sesuai sistem, serta terdapat 2 Paket yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan hasil uji geolistrik tidak ada air.

Alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan pencapaian target kinerja:

- Persentase Kerjasama yang diimplementasikan adalah dengan mengoptimalkan koordinasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
- Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu, adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM.
- Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu adalah dengan melaksanakan optimalisasi penyelesaian

ketepatan waktu pengumpulan data LPPD dan LKPJ pada tenggat waktu yang telah ditentukan.

- Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik adalah dengan meningkatkan jumlah rumah ibadah dan sarpras keagamaan kondisi baik melalui pendataan. Serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi adalah dengan melaksanakan peringatan kegiatan keagamaan.
- Persentase produk hukum yang difasilitasi, adalah adanya komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan serta terlaksananya propempera dan propempera sesuai waktu pelaksanaan yang telah disusun.
- Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah optimalisasi pendokumentasian produk hukum daerah ke JDIH sesuai dengan jumlah produk hukum yang ditetapkan pada tahun berjalan.
- Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi, adalah terjaganya sinergitas yang baik antara bagian hukum, OPD terkait, dan anggota Forkompida Kab. Temanggung sehingga mempermudah pelaksanaan mediasi dan pencarian jalan keluar serta optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi di Kabupaten Temanggung.
- Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi, adalah adanya integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum serta optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi di Kabupaten Temanggung.
- Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi adalah dengan memberikan sosialisasi dan monitoring secara berkala kepada agen/pangkalan LPG dan BBM dan memastikan kuota barang bersubsidi pada awal tahun.

- Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan adalah dengan enghimbau agar aduan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen/ bukti pendukung.
- Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP adalah dengan elakukan pembinaan dan koordinasi secara intensif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama dengan Tim Pembina dan Dewan Pengawas terutama dalam pencatatan dan administrasi laporan keuangan.
- Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Selesai Tepat Waktu, upaya pencapaian target adalah Koordinasi internal dan eksternal, Penetapan target yang realistis, dan Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan.
- Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu, upaya pencapaian target adalah tertib pelaporan, evaluasi pelaporan dan Peningkatan kapasitas admin simpelbangda.
- Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah, adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target adalah Perencanaan diusahakan N-1.
- Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender), upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah Dengan Membuat surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Nomor: B/7/800/01/I/2024 Tgl. 10 Januari 2024 tentang Pemberitahuan Surat Pejabat Pengadaan Bagian PBJ untuk Perangkat daerah se-Kabupaten Temanggung; Business Maching dan Penguatan SDM PBJ dalam ePurchasing untuk Pelaku Pengadaan; dan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan ePurchasing secara Toko Daring.
- Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta), adalah dengan membuat surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

- Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah membuat surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor: B/218/050/01/X/2023 tentang Pencatatan Non Tender pada SPSE.
- Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kemampuan SDM, Koordinasi antar bagian yang dilaksanakan secara rutin dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait secara intensif.
- Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah adalah dengan meningkatkan koordinasi dan melaksanakan perubahan anggaran serta pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku.
- Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB adaah dengan menyusun Pohon kinerja, Bimbingan teknis Perencanaan Kinerja serta pengukuran dan laporan kinerja yang semakin baik.
- Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah adalah dengan mengkomunikasikan kegiatan pimpinan yang akan dilaksanakan dengan skala prioritas

BAB III

EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Sekretariat Daerah yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3. 1
Program, kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	66,36	B>60-70		B>60-70		B>60-70		B>60-70		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,91	B/76,61 – 88,30		B/76,61 – 88,30		B/76,61 – 88,30		B/76,61 – 88,30		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01	Sekretariat Daerah				33.892.866.310		34.062.330.642		34.232.642.295		102.187.839.247		
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.077.627.310		27.213.015.447		27.349.080.524		81.639.723.281	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	A- (4,29)	B (3,51-4,00)		B (3,51-4,00)		B (3,51-4,00)		B (3,51-4,00)		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
	Meningkatnya pelayanan kerumaha tanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi			Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	25.026.953.973	100	25.082.342.110	100	25.138.407.187	100	75.247.703.270	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.328.710.810		14.328.710.810		14.328.710.810		42.986.132.430	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	125	14.328.710.810	125	14.328.710.810	125	14.328.710.810	125	42.986.132.430	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	200	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	300.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.051.100.000		2.060.488.037		2.116.553.214		6.228.141.351	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	300.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	300.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				Jumlah Paket										Sekretariat Daerah	Kab.

		4.01.01.2.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	360.000.000	riat Daerah	Temangung
		4.01.01.2.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	650.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temangung
		4.01.01.2.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	150.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temangung
		4.01.01.2.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	3.000.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temangung
		4.01.01.2.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	481.100.000	12	490.488.037	12	496.533.214	12	1.468.141.351	Sekretariat Daerah	Kab. Temangung
		4.01.01.2.02.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		600.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temangung
		4.01.01.2.02.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	44	100.000.000	44	100.000.000	44	100.000.000	44	300.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temangung
		4.01.01.2.02.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	300.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temangung
		4.01.01.2.02.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.396.394.000	12	4.396.394.000		4.396.394.000		13.189.182.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temangung

		4.01.01.2.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	45.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	1.098.400.000	12	1.098.400.000	12	1.098.400.000	12	3.295.200.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	3.282.994.000	12	3.282.994.000	12	3.282.994.000	12	9.848.982.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.805.000.000		1.905.000.000		1.905.000.000		5.615.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	9	250.000.000	9	250.000.000	9	250.000.000	9	750.000.000	Sekretariat Daerah	Temanggung
		4.01.01.2.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	124	124	750.000.000	124	750.000.000	124	750.000.000	124	2.250.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150	150	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	150	225.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

		4.01.01.2.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	120	100.000.000	120	100.000.000	120	100.000.000	120	300.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	600.000.000	6	700.000.000	6	700.000.000	6	2.000.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				509.749.163		509.749.163		509.749.163		1.529.247.489	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	169.749.163	2	169.749.163	2	169.749.163	2	509.247.489	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan	50	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	900.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				Wakil Kepala Daerah yang Disediakan											
		4.01.01.2.02.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	120.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.12	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				1.636.000.000		1.582.000.000		1.582.000.000		4.800.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

		4.01.01.2.02.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	12	354.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	954.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	12	282.000.000	12	282.000.000	12	282.000.000	12	846.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	3.000.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	30,34	17.39	200.000.000	23.9	240.000.000	32.6	280.000.000		720.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.13.01	Kegiatan Penataan Organisasi											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.13.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	2	53.000.000	2	75.000.000	2	97.000.000	2	225.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.13.03	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	240.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.13.04	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	2	18.000.000	2	20.000.000	2	22.000.000	2	60.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.13.05	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan	2	2	12.000.000	2	15.000.000	2	18.000.000	2	45.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

				Tata Laksana											
		4.01.01.2.1 3.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	2	37.000.00 0	2	50.000.000	2	63.000.000	2	150.000.000	Sekre- tariat Daerah	Kab. Temang- gung
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	100	1.850.673 .3 37	100	1.890.673. 3 37	100	1.930.673. 3 37	100	5.672.020. 0 11	Sekre- tariat Daerah	Kab. Temang- gung
		4.01.01.2.1 1	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											Sekre- tariat Daerah	Kab. Temang- gung
		4.01.01.2. 11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16	16	600.000.000	16	600.000.000	16	600.000.000	16	1.800.000.000	Sekre- tariat Daerah	Kab. Temang- gung
		4.01.01.2.1 4	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											Sekre- tariat Daerah	Kab. Temang- gung
		4.01.01.2.1 4.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	500	500	300.673.337	500	340.673.337	500	360.673.337	500	1.002.020.011	Sekre- tariat Daerah	Kab. Temang- gung
		4.01.01.2. 14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2000	2000	650.000.000	2000	650.000.000	2000	660.000.000	2000	1.960.000.000	Sekre- tariat Daerah	Kab. Temang- gung
		4.01.01.2. 14.03	Pendokumentasi- an Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumenta	800	800	300.000.000	800	300.000.000	800	310.000.000	800	910.000.000	Sekre- tariat	Kab. Temang- gung

				sian Tugas Pimpinan										Daerah	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel			Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah (EPPD)	3,434	3,44		3,44		3,44		3,44		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual			Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum			Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02	Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat				4.783.738.600		4.807.657.293		4.831.695.579		14.423.091.472	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	100	475.000.000		482.978.693		492.978.693		1.450.957.386	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	100								Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	100								Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

		4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12	12	30.000.000	12	37.978.693	12	37.978.693		1.450.957.386	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	35.000.000		105.957.386	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6	6	385.000.000	6	385.000.000	6	385.000.000		85.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02.2.04	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000		1.155.00.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	88	85	2.883.000.000	86	2.890.970.000	88	2.900.970.000	89	8.674.940.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	80	80		80		80		80			
		4.01.02.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	2	2	1.250.000.00	2	1.252.670.000	2	1.252.670.000	2	3.755.340.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

				Bina Mental Spiritual											
		4.01.02.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan	1	1	388.300.000	1	388.300.000	1	388.300.000	1	1.164.900.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB											
		4.01.02.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	1	1.250.000.000	1	1.250.000.000	1	1.260.000.000	1	3.760.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

		4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase produk hukum yang difasilitasi	-		1.425.738.600		1.433.708.600		1.437.746.886		4.297.194.086	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase penyelesaian	100	100		100		100		100		Sekretariat	Kab. Temanggung
				permasalahan hukum secara litigasi										Daerah	ung
		4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	111	111	50.000.000	111	50.000.000	111	54.038.286	111	154.038.286	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	30	30	1.330.000.000	30	1.330.000.000	30	1.330.000.000	30	3.990.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	111	111	45.738.600	111	53.708.600	111	53.708.600	111	153.155.800	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi			Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel			Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	30	30		30		30		30		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan				2.031.500.400		2.041.657.902		2.051.866.192		6.125.024.494	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100		1.605.432.000	100	1.608.432.000	100	1.611.432.000	100	4.825.296.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100			100		100		100		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	66,67	83,33		83,33		83,33		83,33		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	12	177.716.000	12	177.716.000	12	180.716.000	12	536.148.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	2	57.716.000	2	60.716.000	2	60.716.000	2	179.148.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

		4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	2	1.370.000.000	2	1.370.000.000	2	1.370.000.000	2	4.110.000.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	100	150.000.000	100	154.157.500	100	158.365.794	100	462.523.294	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	1	67.000.000	1	70.000.000	1	72.208.294	1	209.208.294	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100	100	83.000.000	100	84.157.500	100	86.157.500	100	253.315.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

		4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barangjasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	95	95	276.068.400	95	279.068.400	95	282.068.400	95	837.205.200	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan	95	95		95		95		95		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	30	30		30		30		30		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	85	85	138.789.200	85	138.789.200	85	138.789.200	85	416.367.600	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	46	46	131.229.200	46	131.229.200	46	134.229.200	46	396.687.600	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	103	103	6.050.000	103	9.050.000	103	9.050.000	103	24.150.000	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

Sedangkan realisasi program dan kegiatan yang telah dicapai disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2
realisasi program dan kegiatan yang telah dicapai

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi		Capaian Kondisi Akhir RPD (%)		Skala Nilai Peringkat Kinerja
						Tahun 2026		Tahun 2024				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	predikat	B>60-70		66,36		100		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	predikat	B/76,61 – 88,30		84,97		100		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	predikat	B (3,51-4,00)	210.000.000	A- (4,29)	201.000.452	100	95,71	
		Meningkatnya pelayanan kerumah tanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi		Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan	%	100	36.946.881.268	100	35.330.368.648	100	95,62	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	33.922.390.562	100	32.463.840.472	100	95,7	Sangat Tinggi
				Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100		100		100		Sangat Tinggi

			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	13.700.662.841	100	13.531.914.353	100	98,77	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	angka	125	13.700.662.841	125	13.531.914.353	100	98,77	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	3.277.997.500	100	3.203.563.080	100	97,73	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	angka	12	100.000.000	12	91.182.036	100	91,18	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	angka	12	126.900.000	112	122.386.090	100	96,44	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	angka	12	120.000.000	12	117.306.872	100	97,76	

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	angka	12	200.000.000	12	199.102.850	100	99,55	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	angka	12	50.000.000	12	31.264.500	100	62,53	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	angka	12	2.200.000.000	12	2.182.219.000	100	99,19	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	angka	12	481.097.500	12	460.101.732	100	95,64	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.014.903.900		6.788.596.600		96,77	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Angka	10	6.373.512.400	10	6.219.059.000	100	97,57	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	angka	1	499.999.500	1	439.082.000	100	87,82	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	angka	8	141.392.000	8	130.455.600	100	92,27	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Penyediaan Jasa Surat Menyurat,	%	100	5.896.394.000	100	5.407.943.086	100	91,71	

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	angka	12	15.000.000	12	13.076.000	100	87,17	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	angka	12	1.098.400.000	12	942.782.887	100	85,83	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	angka	12	4.782.994.000	12	4.452.084.199	100	93,08	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian indikator Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan/Rehab	%	100	2.214.349.000	100	2.002.929.523	100	90,45	

				ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	angka	9	249.999.000	9	245.542.029	100	98,22	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	angka	124	749.994.000	124	708.051.052	100	94,41	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	angka	150	84.820.000	150	79.310.000	100	93,50	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	angka	120	99.645.000	120	72.073.240	100	72,33	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	angka	1	19.900.000	1	19.210.000	100	96,53	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	angka	6	1.009.991.000	6	878.743.202	100	87	
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase capaian indikator Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelaksanaan	%	100	368.083.321	100	174.685.000	100	47,46	

				Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	angka	2	28.083.321	2	0	100	0	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	angka	50	300.000.000	50	174.685.000	100	58,23	
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	angka	2	40.000.000	2	0	100	0	
			Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase capaian indikator Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100	1.450.000.000	100	1.354.208.830	100	93,39	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	angka	12	300.000.000	12	300.000.000	100	100	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala	angka							

			Kepala Daerah	Daerah yang Disediakan								
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	angka	12	1.150.000.000	12	1.054.208.830	100	91,67	
			<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	angka	17,39	120.000.000	30,43	201.000.452	100	95,72	Sangat Tinggi
			Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase capaian indikator Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah pada Kegiatan Penataan Organisasi	%	100	120.000.000	100	201.000.452	100	95,72	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	angka	2	50.000.000	2	48.730.949	100	97,46	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	angka	2	50.000.000	2	49.814.000	100	99,63	
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	angka	2	35.000.000	2	34.953.003	100	99,87	

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	angka	2	75.000.000	2	67.502.500	100	90	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	3.024.490.706	100	2.866.528.176	100	94,77	Sangat Tinggi
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase capaian indikator Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	600.000.000	100	509.820.000	100	84,97	
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	angka	16	600.000.000	16	509.820.000	100	84,97	
			Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase capaian indikator Fasilitas Keprrotokolan, Fasilitas Komunikasi Pimpinan, Pendokumentasian Tugas Pimpinan pada Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	100	2.424.490.706	100	2.356.708.176	100	97,20	
			Fasilitas Keprrotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprrotokolan	angka	500	676.239.853	500	671.771.812	100	99,34	
			Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	angka	2000	1.413.251.000	2000	1.412.298.213	100	99,93	
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas	angka	800	334.999.853	800	272.638.151	100	81,39	

				Pimpinan								
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel		Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah (EPPD)	angka	3,44	979.297.000	3,434	967.584.408	99,83	98,8	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual		Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	%	100	26.583.750.100	100	26.080.450.943	93,31	98,11	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum		Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	%	100	1.640.738.600	100	1.629.416.953	93,31	99,31	Sangat Tinggi
			Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat									
			<i>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	%	100	979.297.000	100	967.584.408	100	98,8	Sangat Tinggi
				persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	100		100		100		Sangat Tinggi
				persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	100		100		100		Sangat Tinggi
			Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian indikator Penataan Administrasi Pemerintahan,	%	100	953.895.100	100	942.966.708	100	98,85	

				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan								
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	12	11.755.400	12	11.219.500	100	95,44	
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	12	12.139.700	12	10.573.250	100	87,1	
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	6	930.000.000	6	921.173.958	100	99,05	
			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase capaian indikator Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	100	25.401.900	100	24.617.700	100	96,91	
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	12	25.401.900	12	24.617.700	100	96,91	
			<i>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>	persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	85	26.583.750.100	87,84	26.080.450.943	100	98,11	Sangat Tinggi
				persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	60		80		100		Sangat Tinggi
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian indikator Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi,	%	100	26.583.750.100	100	26.080.450.943	100	98,11	

				dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	2	675.000.100	2	604.911.569	2	89,62	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1	24.733.977.600	1	24.485.903.084	1	99	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan	Dokumen	1	1.174.772.400	1	989.636.290	1	94,24	

			Masyarakat	Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas								
			<i>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>	persentase produk hukum yang difasilitasi	%	85	1.640.738.600	100	1.629.416.953	100	99,31	Sangat Tinggi
				persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100		100		100		Sangat Tinggi
				persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100		100		100		Sangat Tinggi
				persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100		100		100		Sangat Tinggi
			Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase capaian indikator Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, Fasilitasi Bantuan Hukum pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%	100	1.640.738.600	100	1.629.416.953	100		
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	angka	111	50.000.000	111	48.453.303	111	96,91	
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	angka	30	1.545.000.000	30	1.540.224.075	30	99,69	

			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	angka	111	45.738.600	111	40.739.575	111	89,07	
		Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi		Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	%	100	1.062.478.022	100	966.960.008	100	91,1	
		Meningkatnya penyelenggara an pemerintah yang akuntabel		Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	%	30	251.630.400	71,76	239.427.948	100	95,15	
			Program Perekonomian dan Pembangunan									
			<i>Program Perekonomian dan Pembangunan</i>	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	905.398.022	100	817.501.785	100	90,29	Sangat Tinggi
				persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100		100		100		Sangat Tinggi
				persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33		83,33		100		Sangat Tinggi
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase capaian indikator Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	%	100	185.432.000	100	156.336.025	100	84,31	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	angka	12	127.716.000	12	101.736.675	12	79,66	

			Pengelolaan BUMD dan BLUD	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	angka	2	57.716.000	2	54.599.350	2	94,6	
			Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase capaian indikator Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan pada kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100	719.966.022	100	661.165.760	100	91,83	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	angka	12	719.966.022	12	661.165.760	12	91,83	
			<i>Program Perekonomian dan Pembangunan</i>	persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	%	100	157.080.000	95,54	157.080.000	95,54	95,15	Sangat Tinggi
				persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100		97,09		97,09		Sangat Tinggi
				persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	100		97,76		97,76		Sangat Tinggi
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase capaian indikator Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program	%	100	157.080.000	100	157.080.000	100	95,15	

				Pembangunan pada Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	angka	1	50.000.000	1	48.428.148		96,86	
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	angka	4	107.080.000	4	101.030.075		4	
			<i>Program Perekonomian dan Pembangunan</i>	persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barangjasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%	100	251.630.400	97,70	239.427.948	97,70	95,15	Sangat Tinggi
				persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan	%	100		100		100		Sangat Tinggi
				persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	97		30		80,93		Tinggi
			Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian indikator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	251.630.400	100	239.427.948	100	95,15	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan	angka	85	127.034.200	85	116.746.647	100	91,90	

				Barang dan Jasa								
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	angka	46	120.612.200	46	119.252.301	100	98,87	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	angka	103	3.984.000	103	3.429.000	100	86,07	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung rata-rata capaiannya yaitu 100% masuk dalam kategori sangat Tinggi dan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran adalah sebesar 99,02% masuk dalam kategori sangat Tinggi.

Adapun Indikator Program Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 50 juta. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah membuat surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor: B/218/050/01/X/2023 tentang Pencatatan Non Tender pada SPSE belum mencapai target karena Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 50 juta. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah membuat surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor: B/218/050/01/X/2023 tentang Pencatatan Non Tender pada SPSE.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 khususnya di Sekretariat Daerah. Evaluasi ini sekaligus untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi Renstra ini nantinya dapat digunakan dalam penentuan prioritas pembangunan di Sekretariat Daerah pada tahun mendatang. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rencana Strategis disusun supaya dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam upaya pencapaian target-target pembangunan di Sekretariat Daerah untuk periode tahun-tahun berikutnya.

4.2 Rekomendasi

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di masa mendatang diantaranya adalah :

- a. Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung secara berkala;
- b. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada awal tahun;
- d. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan.

Temanggung, 6 Januari 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung

Agus Sujarwo

